



# **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terhadap Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**

**Teguh Iman Pribadi**  
Universitas Garut

[\\*24091724038@pasca.uniga.ac.id](mailto:*24091724038@pasca.uniga.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurang optimalnya efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang diduga dipengaruhi oleh pelaksanaan Kebijakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta manajemen kelembagaan satuan pendidikan yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan statistik dan model analisis regresi berganda. Populasi sekaligus responden penelitian berjumlah 140 kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan, manajemen kelembagaan, dan efektivitas program sarana dan prasarana secara umum berada pada kategori sangat baik. Pengujian hipotesis membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan manajemen kelembagaan berpengaruh positif dan cukup kuat terhadap efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan secara simultan. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan pada aspek dukungan anggaran pegawai, pembagian beban kerja, pembimbingan, serta penyelesaian tugas yang belum optimal.

**Kata Kunci :** Manajemen, Efektivitas, Pendidikan, Dinas Pendidikan, Sarana dan Prasarana

## **1. Pendahuluan**

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen strategis dalam mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis pembelajaran, tetapi juga menjadi indikator mutu layanan pendidikan serta kenyamanan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana yang sistematis, efisien, dan akuntabel menjadi prasyarat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Mulyasa (2022) menegaskan bahwa kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan sarana prasarana yang terencana dan berkelanjutan. Sebagai landasan regulatif, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Kebijakan ini mengatur secara komprehensif tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, hingga penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjamin

tersedianya fasilitas pendidikan yang layak, merata, dan berkelanjutan pada seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Di Kabupaten Garut, implementasi kebijakan tersebut pada tahun 2024 menunjukkan adanya komitmen anggaran yang relatif kuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp61,7 miliar untuk pembangunan fisik dan pengadaan sarana pendidikan dasar. Alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan serta menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret di tingkat daerah. Dari sisi perencanaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut telah melakukan sosialisasi teknis kepada lebih dari 300 kepala sekolah dan ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip partisipatif dan transparansi, di mana Pokmas diberi peran dalam pelaksanaan pembangunan sarana pendidikan secara swakelola di bawah pengawasan sekolah dan dinas terkait. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan fisik juga berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi setempat. Namun demikian, implementasi kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 di Kabupaten Garut belum sepenuhnya berjalan efektif. Berbagai permasalahan masih ditemukan, terutama pada aspek perencanaan berbasis data, pengadaan, pemeliharaan, serta pengawasan dan evaluasi. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 87% sekolah yang memperbarui data

kebutuhan sarana prasarana secara berkala, sementara realisasi pengadaan tepat waktu baru mencapai 78%. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Permasalahan lain yang menonjol adalah ketidaksesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis serta keterlambatan penyelesaian proyek. Beberapa fasilitas pendidikan baru tersedia ketika tahun ajaran telah berjalan, sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Supartika et al. (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya mekanisme pengadaan menjadi salah satu penyebab rendahnya efisiensi program pendidikan. Dari aspek pemeliharaan, sebagian besar sekolah belum memiliki anggaran rutin dan jadwal pemeliharaan sarana, sehingga banyak fasilitas cepat mengalami kerusakan dan tidak berfungsi secara maksimal. Pengawasan dan evaluasi juga menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan. Monitoring lapangan belum dilakukan secara berkala dan sistem pelaporan masih bersifat manual serta tidak terintegrasi. Akibatnya, pengambilan keputusan berbasis data menjadi kurang optimal, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2022) bahwa sistem evaluasi yang tidak konsisten akan menyulitkan peningkatan kinerja organisasi pendidikan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Garut memperoleh apresiasi nasional berupa Anugerah Merdeka Belajar dalam kategori Transformasi Anggaran Pendidikan. Penghargaan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya merefleksikan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Garut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan manajemen kelembagaan. Arikunto (2021) menekankan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 terhadap manajemen kelembagaan satuan pendidikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Garut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan serta rekomendasi perbaikan tata kelola sarana dan prasarana pendidikan di tingkat daerah.

## 2. Metodologi

Bagian Metode penelitian menjelaskan tentang: pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi operasional variable/deskripsi fokus penelitian, tempat, populasi dan sampel/informan, bahan dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bagian ini berisi uraian prosedur dan langkah-langkah penelitian yang bersifat khas sesuai dengan topik yang dikaji.

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survey. Pendekatan ini melibatkan variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi yang memiliki hubungan sebab-akibat yang efektif di antara mereka. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan menggunakan metode angket terhadap 140 responden, wawancara, dan observasi. Instrumen penelitian diuji untuk validitas dan reliabilitasnya, dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dan statistik.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan sarana dan prasarana terhadap manajemen kelembagaan satuan pendidikan dalam meningkatkan efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, bahwa Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sudah baik Indikator tertingginya ada pada standar operasional prosedur (SOP) dengan kriteria Sangat Baik adapun indikator terendah ada pada indikator Dukungan anggaran pegawai termasuk dalam kategori cukup Baik. Manajemen kelembagaan satuan pendidikan hasil dari analisis data ditemukan bahwa sudah baik adapun indikator tertinggi ada pada indikator penetapan sasaran dari perencanaan sedangkan indikator terendahnya ada pada indikator pembagian tugas/beban kerja serta pembimbingan termasuk dalam kategori cukup Baik. Efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Sudah sangat baik hasil dari analisis data bahwa didapat indikator tertinggi ada pada kualitas sarana dan prasarana dengan kriteria sangat baik dan indikator terendahnya ada pada indikator Penyelesaian tugas dengan katagori cukup baik. Temuan dilapangan dari hasil penelitian ini bahwa Dukungan anggaran pegawai, pembagian tugas/beban kerja serta pembimbingan dan Penyelesaian tugas masih belum optimal. Berdasarkan hasil Uji simultan menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara keseluruhan untuk menerangkan variabel terikat atau dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dan membandingkan antara t-hitung dan t-tabel. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan sebaliknya, jika t-hitung < t-tabel maka setiap variabel independen yang diteliti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah dengan menggunakan model regresi berganda. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti ingin meneliti pengaruh dari dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Berikut disajikan hasil dari analisis regresi linear berganda.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.643	4.516		4.128	.000
1 Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana	.272	.055	.342	4.907	.000
Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan	.773	.122	.440	6.317	.000

Sumber : Peneliti 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa kedua variabel bebas, yaitu Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan. Nilai koefisien untuk variabel pelaksanaan kebijakan sebesar 0,272 dengan nilai signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, maka efektivitas program akan semakin meningkat. Hal ini dipertegas oleh nilai t-hitung sebesar 4,907 yang lebih besar dari t-tabel, sehingga variabel ini terbukti berpengaruh secara signifikan. Sementara itu, variabel manajemen kelembagaan satuan pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar 0,773 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti bahwa perbaikan dalam tata kelola kelembagaan mampu meningkatkan efektivitas program sarana dan prasarana secara lebih besar. Nilai t-hitung sebesar 6,317 yang lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya menunjukkan bahwa variabel ini merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas program. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin optimal pelaksanaan kebijakan sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2013 dan semakin efektif manajemen kelembagaan pada satuan pendidikan, maka efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut akan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan regulasi yang baik, diikuti tata kelola kelembagaan yang kuat, merupakan kunci dalam mencapai program sarana dan prasarana pendidikan yang efektif. Uji F (uji simultan) dalam analisis regresi adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independen (bebas) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (terikat). Dengan kata lain, uji F digunakan untuk menguji kelayakan atau keberartian model regresi secara keseluruhan apakah model yang digunakan

mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Berikut Hasil Uji F disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Uji Keadalan Model (Uji F)**

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	3459.035	2	1729.517	49.131	.000 <sup>b</sup>
<i>Residual</i>	4822.651	137	35.202		
<i>Total</i>	8281.686	139			

a. Dependent Variable: Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan

b. Predictors: (Constant), Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan, Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis ANOVA yang disajikan pada Tabel di atas, uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibangun signifikan secara keseluruhan dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 49,131 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini berada di bawah taraf  $\alpha = 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Dengan kata lain, kedua variabel prediktor, yaitu Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan dan pelaksanaan kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 akan berdampak positif terhadap efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Sedangkan hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bahwa Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini,  $R^2$  variabel pelaksanaan kebijakan permendikbud no. 23 tahun 2013 tentang pengelolaan sarana dan prasarana dan variabel manajemen kelembagaan satuan pendidikan. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.646 <sup>a</sup>	.418	.409	5.93311

a. Predictors: (Constant), Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan, Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil Model Summary, hubungan antara variabel prediktor, yaitu Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, dengan variabel dependen Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan tergolong positif dan cukup kuat, ditunjukkan oleh nilai  $R = 0,646$ . Selanjutnya, nilai  $R$  Square sebesar 0,418 menunjukkan bahwa 41,8% variasi efektivitas program

sarana dan prasarana pendidikan dapat dijelaskan oleh kedua variabel prediktor secara bersama-sama. Nilai Adjusted R Square = 0,409 memperhitungkan ukuran sampel dan jumlah prediktor, sehingga secara realistis sekitar 40,9% variasi efektivitas program dapat dijelaskan oleh manajemen kelembagaan satuan pendidikan dan pelaksanaan kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013, sementara sisanya sebesar 59,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini.

Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan, meskipun terdapat faktor lain yang juga memengaruhi efektivitas program tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan sarana dan prasarana, manajemen kelembagaan satuan pendidikan dan efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Sudah sangat baik, Adapun hasil pengujian hipotesis bahwa Manajemen Kelembagaan Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, 8 dengan variabel dependen Efektivitas Program Sarana dan Prasarana Pendidikan tergolong positif dan cukup kuat, artinya bahwa variasi efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan dapat dijelaskan oleh kedua variabel prediktor secara bersama-sama. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa peningkatan pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program sarana dan prasarana pendidikan, meskipun terdapat faktor lain yang juga memengaruhi efektivitas program tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2009). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, Fakultas Ekonomi
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Perbandingan administrasi negara* (Vol. 1, Issue 1). CV Pustaka Setia.
- Apriansyah, M., Pamungkas, I. B., & Wibowo, W. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(4), 731–740.
- Arifin, M. (2018). Pengaruh budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap kinerja tenaga pendidik di SMPN 2 Paciran. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. (No Title). Arikunto, S. (2021). *Penelitian tindakan kelas: Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Azizah, F. Z., & Fadil, M. (2023). Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Pendidikan Islam. *International Seminar On Islamic Education & Peace*, 3, 204–219.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches*. Sage Publications.
- Davis, K. dan Jhon W. N. (2009). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public Administration: An Action Orientation* (7th ed.). Cengage Learning.
- Enggarani, N. S. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. *Law and Justice*, 1(1), 16–29.
- Ermaya. Suradinata, (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Ramadhan
- Gibson, J. . (2011). *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Erlangga. Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.
- Handyaningrat, S. (2002). Pengantar suatu Ilmu administrasi dan Manajemen. *Gunung Agung, Jakarta*.
- Hadi, S. (2017). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In *PT Bumi Aksara. Jakarta* (Cetakan Ke 2).
- Irawan, A., & Satori, D. (2013). Pengaruh regulasi, pembiayaan dan partisipasi Masyarakat terhadap efektivitas manajemen sarana prasarana sekolah, dan dampaknya terhadap efektivitas pembelajaran pada sekolah menengah pertama se Kota Sukabumi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(1).
- Iskandar, J. (2019a). *Kapita selekta administrasi Negara*. Bandung: Puspaga. Iskandar, J. (2019b). Metodologi Penelitian Administrasi. *Puspaga, Bandung*. Juharni, M. S. (2017). *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Kasmad, R. (2013). Studi Implementasi Kebijakan Publik. *Makassar: Kedai Aksara*.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2014). *Philip Kotler*. Astromax Entertainment. Leo Agustino. (2008) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Martini, L. (1987). *Teori Organisasi*. Ghalia Indonesia.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri*. Yogyakarta: Gadjah mada university press.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Prasetyo, E. B. (2017). *Implementasi Pembiasaan Nilai-Nilai Asmaul Husna Di SMAN 2 Kota Serang Dalam Pembentukan Karakter Religius Siswa*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ravianto, J. (2014). Produktivitas dan pengukuran. *Jakarta: Binaman Aksara*. Ridha Suaib, M. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Calpulis.

- Riduwan. (2014). *Dasar-dasar statistika*. Alfabeta.
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education*. Routledge. Sedarmayanti, S., & Rahadian, N. (2018). Hubungan Budaya Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 63–77.
- Sedarmayanti, T. L. dan M. (2020). *Inovasi dan Manajemen Pengetahuan untuk Mewujudkan SDM Unggul*. Refika Aditama.
- Steers, Richard.M (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*, Jakarta, Erlangga.
- Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-asas manajemen*. Refika Aditama. Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel*. Ipdn Press.
- Soekarno. (2017). *Dasar- Dasar Manajemen “*, Miswar, Jakarta. Miswar.
- Stoner, A.F, James dan Edward Freeman (eds). (2014). *Manajemen*. PT Prenhallindo.
- Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik. *Edisi Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supartika, E. Y., Kosasih, & Asnar, E. S. M. (2024). STRATEGI MENINGKATKAN CAPAIAN INDIKATOR KAPITASI BERBASIS KINERJA (KBK) MELALUI FUNGSI MANAJEMEN DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. 18(1978), 2553–2566.
- Suryosubroto, B. (2022). *Manajemen pendidikan di sekolah*. Rineka Cipta. Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Strategi Keunggulan Pelayanan Publik: Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik (Konsep-Teori & Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Konsep Russel)*. Kerja sama Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset ....
- Thoha, M. (2014). Ilmu Administrasi Negara Publik Kontemporer. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Wahyudi, R. (2018). Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Manajemen Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 115–127.
- Wardhani, E. R. (2018). *Manajemen Perubahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Internal*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Wibowo. (2019). *Perilaku Dalam Organisasi* (3rd ed.). Rajawali Pers. Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan studi kasus*, Jakarta: PT. *Buku Seru*.